

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Hubungan bilateral Australia-Indonesia sudah terjalin sejak lama. Sebagai negara yang bertetangga dekat, kedua negara ini rupanya tidak dapat saling mengabaikan satu sama lain. Hal ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Kepentingan ini menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedua negara, yakni politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Meskipun memang pada awalnya kedua negara ini tidak mengenal satu sama lain sebagaimana yang dikatakan oleh O'Hare dan Reid, "Selubung kolonial yang menutup Indonesia dari mata orang luar di kala itu amat rapat, sehingga orang Australia sama sekali tidak mengetahui adanya istilah Indonesia sampai tahun 1945" (O'Hare dan Reid, 1995, hlm.4).

Hubungan baik dengan Indonesia mulai terjalin ketika Australia mendukung kemerdekaan Indonesia lepas dari Pemerintah Kolonial Belanda. Rupanya rasa senasib akibat penjajahan yang dilakukan oleh Bangsa Eropa (Indonesia dijajah Belanda dan Australia dijajah Inggris) membuat Australia menaruh rasa simpati dan ingin membantu Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka. Sebagaimana dikemukakan oleh O'Hare dan Reid bahwa :

Hubungan kolonial menjuruskan perhatian kedua belah pihak ke Eropa, sehingga wajar saja kalau keduanya menjalin hubungan utama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kebudayaan dengan pihak Eropa itu: Indonesia berhubungan dengan Belanda sementara Australia dengan Inggris (O'Hare dan Reid, 1995, hlm.3).

Hubungan antara Australia-Indonesia nampaknya berlanjut ketika Indonesia memasuki masa Revolusi Kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya, ternyata Indonesia belum sepenuhnya lepas dari ancaman Pemerintah Kolonial Belanda yang berusaha merebut kembali

kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagaimana yang dikemukakan oleh O'Hare dan Reid bahwa :

... pada waktu terjadinya aksi militer Belanda yang pertama pada bulan Juli 1947 Australia adalah negara Barat yang paling bersimpati pada tuntutan Republik untuk mendapat status merdeka di kalangan internasional. Jadi ketika Belanda menyerang, kepada Australialah Pemerintah Amir Sjarifuddin menghimbau agar mengajukan masalah Indonesia ke PBB (O'Hare dan Reid, 1995, hlm.25).

Pernyataan di atas menunjukkan Indonesia telah menaruh kepercayaan bahwa Australia dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini dengan tidak merugikan Indonesia.

Rekam jejak hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia selanjutnya mengalami pasang-surut. Ketika masa pemerintahan Perdana Menteri Fraser, hubungan Australia-Indonesia sempat mengalami ketegangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad dalam Kitley, Chauvel dan Reeve bahwa :

pers dunia menampilkan berita penting tentang kunjungan Fraser di Beijing. Transkripsi pembicaraan Fraser dengan Perdana Menteri Cina, Hua Kuo-feng jatuh ke tangan wartawan Indonesia juga termasuk hal yang dibicarakan di sana. Kata Fraser: "Situasi di Indonesia juga relevan. Kemajuan telah diwujudkan oleh pemerintah yang berkuasa sekarang ini. Kami mempunyai rencana bantuan untuk mendukung pembangunan rakyat Indonesia. Tapi karena karakter rezim yang berkuasa sekarang ini, hari depan Indonesia juga menimbulkan pertanyaan" (Kitley, P., Chauvel, R., dan Reeve, D., 1989, hlm.82).

Pernyataan di atas secara eksplisit menyatakan bahwa rezim pemerintahan yang berkuasa di Indonesia saat itu (Presiden Soeharto), bertentangan dengan kepentingan Australia. Hal ini tentu menyinggung perasaan Pemerintah Indonesia dan dapat menyulut terjadinya konflik antara Australia dengan Indonesia.

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard Tahun 1996-2007, pasang-surut hubungan bilateral Australia-Indonesia pun terjadi. John Howard kurang mempedulikan posisi strategis Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan Australia. John Howard sering dianggap "Anti-Asia" dan lebih pro kepada Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat memang memegang peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan Australia. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Darmawan bahwa

Fatmawati, 2018

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JOHN HOWARD: HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA TAHUN 1996-2007

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya” (Darmawan, tt, hlm.108) [diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2017].

Pada periode pertama dan kedua masa pemerintahannya, John Howard tidak memandang Indonesia memiliki posisi yang strategis bagi Australia, malah cenderung untuk membangkitkan rasa permusuhan antara kedua negara. Peristiwa lepasnya Timor-Timur dari Indonesia pada tahun 1999, menjadi salah satu pemicu surutnya hubungan bilateral Australia-Indonesia. Akan tetapi, pada periode ketiga dan keempat masa pemerintahannya, John Howard mulai memandang Indonesia memiliki posisi yang strategis bagi Australia, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan-keamanan. John Howard berkeinginan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Indonesia.

Ketertarikan peneliti terhadap sosok John Howard ini diawali ketika peneliti mengetahui fakta bahwa John Howard menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dalam waktu yang dapat dikatakan cukup lama, yakni sebelas tahun (1996-2007). Sebagaimana diketahui bahwa masa jabatan rata-rata perdana menteri di Australia hanyalah kurang lebih tiga tahun, akan tetapi John Howard mampu mempertahankan kursi jabatannya hingga sebelas tahun. Masa jabatan John Howard yang relatif lama sebagai seorang perdana menteri membuatnya disandingkan dengan Robert Menzies sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah Australia. Sebagaimana dikatakan oleh Murray bahwa *“Howard drew on Robert Menzies’ reputation as the longest-serving Australian Prime Minister...”* (Murray, 2010, hlm.51).

Hal lainnya yang unik dari sosok John Howard adalah mengenai sikap yang diambilnya terhadap Asia, yang juga berimplikasi pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya terhadap Indonesia. Sebagai seorang Perdana Menteri, John Howard sering dinilai sebagai seorang yang konservatif dan hanya mementingkan urusan-urusan dalam negerinya. Kebijakan-kebijakannya juga sering dinilai “Anti-Asia” dan lebih pro kepada Amerika Serikat. Hal ini pun cukup berpengaruh pada terjadinya pasang surut hubungan bilateral Indonesia-Australia.

John Howard juga berupaya untuk meyakinkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang strategis dan sangat penting bagi Australia. Howard dalam Haryani

mengatakan, *“Australia’s bilateral relationship with Indonesia is a strategically important and very close one covering trade and investment, security, intelligence and police cooperation, education and extensive people-to-people ties”* (Haryani, 2008, hlm.353). Berdasarkan pemaparan ini, sikap Perdana Menteri John Howard dapat dikatakan unik. Meskipun sering dijuluki “Anti-Asia”, John Howard tetap berusaha menjaga hubungan baiknya dengan Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pasang-surut hubungan bilateral Australia-Indonesia pada masa Perdana Menteri John Howard Tahun 1996-2007.

Faktor geografis Australia juga menjadi alasan penting dalam keberlangsungan hubungan bilateral Australia-Indonesia itu sendiri. Berbicara mengenai Australia yang merupakan suatu negara yang menempati satu benua tersendiri, letak geografisnya sebagaimana yang dikatakan oleh Siboro bahwa *“Sebagai suatu benua berbentuk pulau yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik, diapit oleh Kepulauan Asia Tenggara dan Daratan Kutub Selatan, secara geografis, Australia berada pada posisi terisolasi”* (Siboro, 1989, hlm.166). Kondisi ini membuat Australia seakan mengalami suatu dilema akibat letak geografis yang dimilikinya. Letaknya ini dapat menjadi keuntungan sekaligus ancaman bagi Australia. Posisinya yang terisolasi membuat Australia seolah dilindungi oleh negara tetangga terdekatnya, yakni Indonesia. Akan tetapi, Indonesia juga dapat dijadikan pintu gerbang bagi negara-negara lain untuk menyerang Australia.

Melihat kenyataan ini, tentunya Australia pun melakukan usaha-usaha yang bertujuan untuk melindungi keberlangsungan kehidupan bangsa dan kepentingan nasionalnya. Salah satu hal yang dilakukan oleh Australia untuk melindungi kepentingan nasionalnya adalah dengan melakukan hubungan bilateral dengan tetangga terdekatnya, yakni Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Australia karena Indonesia memiliki peran yang penting baginya.

Fakta-fakta yang dikemukakan di atas telah menunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan bilateral Indonesia-Australia. Oleh karena itu, sangat urgen pula untuk membuat kajian-kajian mengenai hubungan bilateral antara Indonesia-Australia. Akan tetapi, sayangnya sampai saat ini belum banyak kajian atau studi yang dilakukan mengenai tema ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mar’iyah

Fatmawati, 2018

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JOHN HOWARD: HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA TAHUN 1996-2007

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahwa “...belum banyak *scholars* Indonesia yang memiliki keahlian dalam bidang studi Australia...” (Mar’iyah, 2005, hlm.ix).

Kondisi ini menunjukkan adanya sebuah masalah yang terjadi, yakni kesenjangan antara hal yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Hal yang diharapkan adalah dengan melihat begitu pentingnya hubungan Indonesia-Australia, maka seharusnya banyak dilakukan studi atau kajian mengenai hubungan bilateral kedua negara tersebut. Kajian-kajian ini kemudian dapat digunakan sebagai referensi untuk membangun pemahaman antara kedua negara dan menjaga hubungan bilateral yang baik. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah kajian atau studi mengenai hubungan bilateral Indonesia-Australia dapat dikatakan masih cukup jarang. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman yang baik di antara kedua negara. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait tema hubungan bilateral Indonesia-Australia karena peneliti berharap dapat memberikan sedikit kontribusi untuk menambah studi atau kajian mengenai hubungan bilateral Australia-Indonesia. Penelitian seperti ini dapat dijadikan referensi untuk memahami sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia dan mengetahui urgensi untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Pasang surut hubungan bilateral Indonesia-Australia ini tentunya diakibatkan oleh banyak faktor. Walaupun Australia dan Indonesia ini bertetangga dekat, dalam hal ini berdasarkan letak geografis yang dimiliki oleh kedua negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa secara historis, kultural dan sosiologis, Australia dan Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Oleh karena itu, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia-Australia dapat dikatakan unik karena di antara sekian banyak perbedaan yang dimiliki oleh keduanya, Indonesia dan Australia tetap berusaha menjaga hubungan bilateral mereka hingga saat ini.

Perjalanan hubungan bilateral Australia-Indonesia tidak selamanya berjalan dengan mulus. Berbagai masalah yang banyak mendominasi hubungan kedua negara berasal dari isu HAM ataupun isu hak menentukan nasib sendiri pada beberapa wilayah di Republik Indonesia seperti *self determinism* untuk kasus Timor Timur dan Papua. Lepasnya Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia, dapat dikatakan sebagai salah satu isu negatif yang mendominasi hubungan

Australia-Indonesia. Namun kemudian muncul isu baru mengenai terorisme sejak Peristiwa 11 September 2001. Isu ini menjadi isu sentral hubungan Canberra-Jakarta pada periode pasca 11 September tersebut. Kasus Bom Bali dan kasus terbaru Bom Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia menjadikan isu terorisme memiliki legitimasi kuat dalam kebijakan pemerintah Australia dalam berelasi dengan pemerintah Indonesia (Kitley, P., Chauvel, R., dan Reeve, D., 1989; Mar'iyah, 2005).

Berdasarkan pada pemaparan di atas, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pasang surut hubungan bilateral Australia-Indonesia tersebut terjadi karena berbagai kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Australia, salah satunya John Howard. Maka dari itu, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana hubungan di antara keduanya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana latar belakang keterlibatan John Howard dalam hubungan Australia-Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan Perdana Menteri John Howard terhadap Indonesia tahun 1996-2007?
3. Bagaimana dampak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terhadap perkembangan hubungan bilateral Australia-Indonesia tahun 1996-2007?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti untuk membatasi kajian pokok penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan latar belakang keterlibatan John Howard dalam hubungan Australia-Indonesia.
2. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan Perdana Menteri John Howard terhadap Indonesia tahun 1996-2007.

Fatmawati, 2018

KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JOHN HOWARD: HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA-INDONESIA TAHUN 1996-2007

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Menganalisis dampak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terhadap perkembangan hubungan bilateral Australia-Indonesia tahun 1996-2007.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai berikut.

- a. Menjadi referensi bagi materi sejarah peminatan kelas XII.
- b. Menambah khazanah penulisan sejarah kawasan Australia oleh mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah UPI.
- c. Memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian lain yang mengkaji tema sejarah kawasan Australia khususnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi yang akan ditulis disusun dengan sistematika berikut ini.

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang penelitian penulis yang mengambil judul “Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Perdana Menteri John Howard: Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Tahun 1996-2007”, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini akan berisikan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian yang diambil oleh penulis, penelitian-penelitian terdahulu yang juga relevan, dan posisi teoritis peneliti berkenaan dengan masalah yang diteliti. Literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian juga akan diuraikan di dalam bab ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini akan menguraikan metode serta teknik yang digunakan oleh penulis selama melakukan penelitian mengenai “Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Perdana Menteri John Howard: Hubungan Bilateral Australia-Indonesia Tahun 1996-2007”.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil temuan penulis selama melakukan penelitian. Hasil analisis penulis yakni dengan cara mengaitkan antara hasil-hasil temuan dengan berbagai konsep serta literatur yang telah dikemukakan dalam Bab II juga akan diuraikan dalam bab ini.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis penulis yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Bab ini juga akan menyertakan rekomendasi-rekomendasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan tema yang sama.